

Daftar Isi

Balinese Women and Identities: Are They Trapped in Traditions, Globalization or Both?	
I Wayan Suyadnya	95–104
Konstruksi Identitas Perempuan dalam Majalah <i>Cosmopolitan</i>	
Eva Leiliyanti	105–120
Pemanfaatan Jamu Madura oleh Perempuan di Kabupaten Bangkalan	
Mutmainnah	121–127
Fenomena Bias Gender dalam Pemakaian Bahasa Indonesia	
Moch. Jalal	128–131
Hambatan-Hambatan Struktural-Kultural-Personal Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
Machya Astuti Dewi	132–139
Penguatan Hak-Hak Buruh Migran Melalui Pelibatan <i>Community Based Organization</i> sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura	
Devi Rahayu	140–147
Strategi Sinergi untuk Memberdayakan BUMN di Indonesia	
Diana Sulianti Kristina Lumban Tobing	148–155
Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Hutan di Kawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) Pasuruan Jawa Timur	
Nasikh	156–162
Monitoring dan Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Surabaya	
Benny Soembodo	163–170
Perencanaan Paket Wisata atau Tour	
Edwin Fiatiano	171–178
Pedagang dan Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambak Rejo, Surabaya	
Martinus Legowo, FX Sri Sadewo & M. Jacky	179–187

Hambatan-Hambatan Struktural-Kultural-Personal Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Machya Astuti Dewi¹

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN "Veteran" Yogyakarta

ABSTRACT

The representation of women in the provincial parliament of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) has not been automatically followed by the fulfillment of their interests. This paper explores obstacles faced by female members of the provincial parliament of DIY in their effort to pursue opinions and ideas during the parliamentary meetings, and it has found four obstacles. First, the female members' lack of self confidence. Second, the attitudes of male parliamentary members toward female members. Third, female members' lack of understanding on women issues. Fourth, female members' lack of political education on women's needs.

Key words: women, political capability, interest, political obstacles.

Keterwakilan perempuan ternyata tidak cukup memberi jaminan bahwa kepentingan perempuan berhasil diakomodir. Demikian pula keberadaan wakil-wakil perempuan di lembaga legislatif ternyata tidak menjamin bahwa peraturan daerah yang dibuat akan memperhatikan kepentingan perempuan. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)) menunjukkan kecenderungan ini. Hal itu terlihat dari peraturan-peraturan daerah yang kurang mengakomodir kepentingan perempuan (<http://www.indonesia.com/bernas/052002/21/UTAMA/21met2.htm> diakses 1 Juni 2007). Padahal, di provinsi ini banyak sekali isu yang menyangkut kepentingan perempuan yang mestinya bisa diperjuangkan oleh anggota legislatif perempuan, mulai dari kebutuhan alat kontrasepsi yang murah, pelayanan kesehatan untuk ibu dan balita secara gratis, bantuan untuk peningkatan gizi balita, air bersih, hingga masalah untuk pendidikan perempuan.

Anggota legislatif perempuan cenderung tidak bisa berbuat banyak untuk kaumnya. Sebagian besar dari mereka cenderung tidak banyak berbicara dalam setiap rapat atau sidang (<http://www.suarantb.com/2006/03/16/Sosial/xdetil2.htm> diakses 15 Maret 2007). Ketidakmampuan anggota perempuan dalam menjalankan fungsi mereka di lembaga legislatif membuat keberadaan mereka hanya menjadi penyerta dari wakil rakyat yang lain. Selain itu, kekurangpahaman sebagian besar anggota legislatif

perempuan di Provinsi DIY terhadap masalah-masalah strategis yang dihadapi perempuan telah mengakibatkan misi yang harusnya mereka emban sebagai wakil perempuan dan memperjuangkan kepentingan perempuan menjadi terabaikan (Dewi & Ilkodar, 2007). Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan anggota legislatif perempuan di provinsi DIY kurang memiliki kapasitas politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Tujuan penelitian adalah menggambarkan melalui uraian naratif secara detail profil kehidupan anggota legislatif perempuan, mendeskripsikan pengalaman-pengalaman mereka selama menjadi anggota legislatif perempuan, termasuk yang utama adalah mendeskripsikan hambatan-hambatan yang mereka alami dalam menyampaikan aspirasi perempuan.

Responden meliputi seluruh perempuan anggota DPRD I Provinsi DIY, DPRD II Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Sementara itu informan mencakup para ketua komisi di DPRD Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul yang memiliki anggota perempuan.

¹ Machya Astuti Dewi, Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta. Jl. Babarsari 2 Yogyakarta. Telp. (0274) 487147. E-mail: machdewi@yahoo.com

Pengumpulan data dilakukan dengan menggali data mengenai profil anggota legislatif perempuan dengan memanfaatkan situs internet yaitu DPRD Provinsi DIY, DPRD Kota Yogyakarta, DPRD Sleman dan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara *purposive* dengan anggota legislatif perempuan untuk menggali lebih lanjut latar belakang kehidupan mereka hingga menjadi anggota legislatif, dan selanjutnya meminta mereka untuk menceritakan pengalaman yang mereka alami selama menjadi anggota legislatif dan pengalaman mereka dalam menyuarakan isu-isu dan kepentingan perempuan. Wawancara juga dilakukan dengan para ketua komisi di DPRD Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul. Wawancara dengan para informan ini dilakukan untuk mengetahui pandangan mereka atas kemampuan anggota legislatif perempuan dalam menyuarakan aspirasi ketika berlangsung rapat atau sidang komisi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif-kualitatif. Data dikategorisasikan dan kemudian dipertajam dengan analisis kualitatif naratif.

Kurangnya Kepercayaan Diri

Salah satu penyebab anggota legislatif perempuan tidak banyak berbicara dalam sidang-sidang legislatif adalah karena mereka kurang memiliki kepercayaan diri untuk mengajukan usul atau pendapat. Sumi Hadiyanah dari DPRD Kulonprogo mengemukakan bahwa tantangan menjadi anggota legislatif perempuan sangatlah berat. Kompetisi atau persaingan dengan anggota laki-laki untuk memperjuangkan kepentingan sangat ia rasakan. Hati nuraninya sebagai perempuan terkadang merasa gagal untuk mewujudkan amanah dari konstituen dan ia merasa galau karena dia tidak bisa mengambil jalan politis seperti yang dilakukan laki-laki:

Saya merasa *nggak* mampu mengikuti perpolitikan di dunia laki-laki. Saya melihat 4 perempuan (di DPRD Kulonprogo) itu hampir kewalahan. Kemarin pilihannya kan pilih nama juga. Itu pasti beban dari masyarakat lebih berat. Dititipi *gitu lho*, misalnya dititipi aspirasi yang wujudnya mbak, jalan ini *mbok* ini. Nah ketika di sini kadang-kadang kita tidak bisa, *yo* karena kurang lincah untuk menembus begitu banyak orang yang punya kepentingan. Sebenarnya *yo* tidak perlu saling berebut tapi kalau bisa dimusyawarahkan biar ada pertimbangan dari dapel sana dapel sana. Tapi ternyata tidak seperti

itu (Wawancara dengan Sumi Hadiyanah, 1 Agustus 2008).

Sumi lebih lanjut mengemukakan bahwa forum-forum rapat di DPRD bukan menjadi tempat yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan konstituen. Ada cara dan media lain yang lebih efektif, yaitu kemampuan melakukan lobi dengan lembaga eksekutif di luar forum rapat. Langkah seperti itu menjadi andalan anggota legislatif laki-laki. Sementara anggota legislatif perempuan tidak melakukannya karena tidak memiliki kemampuan melakukan lobi dengan lembaga eksekutif:

Politik itu tidak bisa *fair*, transparan. Jadi ketika rapat di sini, dibanding dengan kita melakukan lobi itu lebih efektif lobinya daripada rapat. Ketika saya *pingin* ini saya kan harus berkoordinasi dengan eksekutif. Itu lebih manjur daripada rapat di sini. Kalau rapat mesti ada orang yang bilang begini-begini, diperdebatkan (Sumi Hadiyanah, 1 Agustus 2008).

Pengakuan Sumi menunjukkan bahwa pengalaman memimpin organisasi ditambah dengan pendidikan politik tidak serta merta mempermudah anggota legislatif perempuan berjuang di tengah-tengah pertarungan kepentingan dengan sesama anggota legislatif. Dominasi anggota laki-laki dalam rapat-rapat dewan terlihat sangat jelas. Mereka berani berbicara secara keras dan tegas, meskipun tidak jarang substansi pembicaraan tidak terarah dan terkesan asal bicara keras. Sikap keras dan tegas semacam itu yang tidak dimiliki oleh anggota legislatif perempuan, sehingga di tengah-tengah sidang legislatif suara mereka cenderung tenggelam, bahkan memilih tidak banyak bicara. Kebanyakan anggota perempuan tidak percaya diri ketika harus mengajukan atau memperjuangkan usulannya dengan cara berbicara secara lantang dan tegas sebagaimana dilakukan laki-laki:

Saya tahu dari pendidikan politik *oh gini lho*, saya harus mulai dari sini... Tapi itu di tataran teori. Begitu terjun itu kayak hutan rimba... Mungkin percaya diri saya yang kurang. Kalau saya lihat anggota dewan yang laki-laki itu pokoknya *waton iso omong*. Pedenya lebih tinggi. *Nyuwun sewu* kadang-kadang bicaranya *error* tapi tetap *pede* dan lobinya bagus-bagus jadi program-programnya, titipan-titipan bisa *goal* (Wawancara dengan Sumi Hadiyanah, 1 Agustus 2008).

Rasa tidak percaya diri di kalangan anggota perempuan tidak saja dijumpai di lingkungan DPRD yang dominasi laki-lakinya masih sangat

terlihat. Di DPRD Kota Yogyakarta yang mayoritas anggota legislatif laki-lakinya menghormati usulan perempuan, ternyata sikap tidak percaya diri dari anggota legislatif perempuan masih ditemui. Dwi Astuti menuturkan kesaksiannya: “Teman-teman sering merasa takut disengiti. Ibu-ibu di sini kalau memperjuangkan pendapat ada yang gigih ada yang enggak. Ada yang pede ada yang enggak, meski boleh dikatakan sudah berani” (Wawancara dengan Dwi Astuti, 3 Juni 2008).

Persoalan kurangnya keberanian anggota legislatif perempuan dalam menyampaikan usulan dalam sidang-sidang DPRD membuat mereka memilih banyak diam selama persidangan. Thomas Kartaya yang menjabat sebagai ketua Komisi 2 di DPRD Kulonprogo menuturkan bahwa anggota legislatif perempuan di komisi yang ia pimpin kurang memiliki keberanian berbicara, bahkan nyaris sama sekali belum pernah mengajukan usulan dalam sidang-sidang komisi:

Saya kurang tahu kenapa anggota saya yang perempuan tidak banyak komentar, hanya *manut-manut*. Sebab pertama mungkin kurang keberanian yang memadai...Kelihatannya tidak ada hal-hal baru yang disampaikan itu yang kemudian menjadi topik pembicaraan. Dia hanya memberikan dukungan-dukungan dari usulan terdahulu yang disampaikan oleh anggota lain (Wawancara dengan Thomas Kartaya, 20 September 2008).

Pernyataan dari anggota legislatif perempuan dan kesaksian dari ketua komisi tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara sikap yang diambil anggota perempuan dengan kondisi lingkungan struktural-kultural tempat anggota perempuan bertugas. Kebanyakan anggota perempuan memilih lebih banyak bersikap diam dalam sidang-sidang DPRD karena merasa tidak mampu, tidak siap atau tidak yakin mereka dapat menandingi kemampuan politik laki-laki.

Sikap Anggota Legislatif Laki-Laki

Faktor penyebab kedua yang menjadikan anggota legislatif perempuan tidak memiliki keberanian untuk menyuarakan kepentingan perempuan dalam persidangan adalah sikap anggota legislatif laki-laki yang cenderung sinis terhadap usulan program perempuan. Meskipun tidak semua anggota legislatif laki-laki bersikap demikian, suara sinis dan bernada mengejek manakala ada anggota yang mengemukakan isu perempuan membuat anggota

legislatif perempuan menjadi enggan mengajukan usul, terutama yang berkaitan dengan persoalan perempuan. Sumi menuturkan pengalamannya:

Kita kalau berbicara persoalan perempuan bapak-bapak itu *bilang*: gender, gender dengan nada sinis *gitu*. Ketika kita *mbahas* KUA (Kebijakan Umum Anggaran), kemudian ada pemberdayaan perempuan dan terus saya *ngomong*, selalu dikomentari: mbak Sumi mesti *ngomong kae*, *ngomong kae*. Mereka (laki-laki) kalo bicara panjang dan lebar sehingga suara perempuan kadang-kadang tidak terdengar. Terus kadang-kadang (perempuan) belum *ngomong* waktu sudah habis. Atau kalau *nggak gitu* (muncul komentar) *iki gendere arep ngomong* (Wawancara dengan Sumi Hadiyanah, 1 Agustus 2008).

Pengalaman serupa juga ditemui di DPRD Bantul. Tri Wahyuni menuturkan bahwa ketika muncul usulan tentang persoalan perempuan maka respon yang muncul dari anggota laki-laki terkadang tidak menyenangkan, bahkan cenderung sinis. Tri sering menjumpai ungkapan-ungkapan dari anggota legislatif laki-laki yang mengesankan ketidaksukaan mereka pada usulan program untuk perempuan:

Ada sedikit nada sinis (dari anggota laki-laki), dengan mengatakan: lah perempuan-perempuan lagi. Usaha tetap dilakukan dengan bekerja sama dengan anggota perempuan lainnya yang biasanya sejalan. Pernah dari anggota laki-laki muncul ungkapan: kurang apa lagi yang belum didapat dari perempuan? Atau yang harus wakili perempuan tidak harus perempuan kan?” (Wawancara dengan Tri Wahyuni, 30 Mei 2008).

Esti Wijayati dari DPRD Provinsi DIY juga menuturkan sikap serupa di kalangan anggota laki-laki. Sebagian anggota dewan cenderung bersikap sinis terhadap usulan untuk kepentingan perempuan. Esti menceritakan sebuah pengalamannya ketika dulu memperjuangkan kenaikan anggaran untuk program PKK. Ia ditentang oleh beberapa anggota laki-laki meskipun sikap menentang itu dilakukan dengan berbicara secara kasak-kusuk:

Pernah saya mencoba usul anggaran untuk PKK itu ditambah karena mereka itu riil sampai di pelosok-pelosok dusun. Mereka (anggota legislatif laki-laki) langsung berteriak apakah kalau untuk perempuan harus lebih banyak? Mereka tidak mau melihat bahwa selama ini banyak prioritas untuk laki-laki. Memang yang berbicara hanya satu dua, tapi tidak ada pembelaan dari yang lain. Tekanan-tekanan secara tidak langsung itu selalu

muncul. *Nggak* setujuanya akhirnya *mung dho glenak glenik*.. Katanya semua kegiatan sudah untuk laki-laki dan perempuan *kok senengane njaluk dibedakke* (Wawancara dengan Esti Wijayati, 18 Agustus 2007).

Sikap anggota legislatif yang cenderung melecehkan usulan-usulan yang menyangkut kepentingan perempuan menyebabkan anggota perempuan enggan memperjuangkan kepentingan yang spesifik perempuan. Dewi Nuraini menuturkan pengalamannya di DPRD Kulonprogo bahwa anggota laki-laki sulit untuk menerima usulan yang berkait dengan kepentingan perempuan, kecuali kepentingan itu sudah menjadi pengetahuan umum yang disadari arti pentingnya oleh semua orang:

Terus terang selama ini justru tidak banyak isu yang saya kemas khusus untuk perempuan. Penolakannya keras. Kecuali kalau hal umum, misalnya kesehatan itu *oke*, sudah umum. Tetapi kalau kemudian menyampaikan usul yang sangat sarat dengan kepentingan perempuan, itu biasanya terus keras. Misalnya perempuan diberdayakan, dikomentari: “Itu tidak harus seperti itu. Kalau dia punya kemampuan, *nggak usah* disodor-sodorkan dia akan diterima”. Ada suara seperti itu (Wawancara dengan Dewi Nuraini, 23 Juli 2008).

Dewi juga menyadari bahwa sebagai perempuan ia sering direndahkan oleh anggota legislatif laki-laki atau politisi laki-laki dengan anggapan bahwa ia kurang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan lobi: “Selama ini saya tidak (diserang) dengan ayat (Al Quran), tapi serangannya dengan alasan kompetensi, lobinya kurang dibanding laki-laki dan sebagainya” (Wawancara dengan Dewi Nuraini, 23 Juli 2008).

Fenomena serupa juga ditemui di DPRD Kota Yogyakarta. Pada umumnya anggota legislatif perempuan di DPRD kota Yogyakarta tidak mengalami hambatan dalam mengemukakan pendapat karena anggota laki-laki menghormati pendapat atau usulan dari anggota perempuan. Namun, superioritas atau perasaan ingin lebih terhormat dari beberapa anggota laki-laki karena merasa lebih senior masih ditemui. Akibatnya, peluang anggota perempuan untuk menduduki jabatan sering kali terpinggirkan akibat respon-respon dari kaum laki-laki yang meremehkan kemampuan perempuan. Dewi menuturkan pengalamannya:

Saya melihat laki-laki banyak yang *nggak* mau *ngalah*. Ada (anggota legislatif) laki-laki itu

respons. Seperti kemarin ada usulan bu Dewi jadi ketua ini ya.. Itu ada yang kemudian bilang: *ah, opo iso mengko gek anu...* Jadi ada keberatan. Itu ada individu yang merasa: mosok saya lebih senior kalah sama yang junior... Buktinya di sini yang *njabat* ketua semua laki-laki (Wawancara dengan Dewi Astuti, 3 Juni 2008).

Beberapa anggota perempuan menyadari bahwa munculnya sikap sinis dari anggota laki-laki semacam itu tidak lepas dari rendahnya kemampuan anggota perempuan dalam menyampaikan gagasan. Persoalan kualitas personal anggota legislatif perempuan dalam menyampaikan usulan menjadi faktor penting yang menentukan apakah anggota laki-laki akan mendukung usulan anggota perempuan atau tidak. Ida Fatimah mengemukakan bahwa respon anggota laki-laki terhadap usulan yang disampaikan anggota perempuan sangat tergantung pada bagaimana kemampuan anggota perempuan tersebut dalam menyampaikan argumen:

Sebelum mengharapkan kaum laki memberikan apresiasi yang harus kita lakukan adalah dari diri kita. Bagaimana perempuan itu sendiri berusaha untuk kualitasnya sama dengan laki-laki. Nah ketika kita sama, ketika satu atau dua perempuan itu ternyata lebih teliti, lebih responsif, ketika kita itu menyampaikan usulan itu penting semua langsung *oke*. Karena itu penampilan dan hasil kualitas perempuan itu sendiri berperan (Wawancara dengan Ida Fatimah, 16 Agustus 2007).

Pernyataan Ida patut menjadi perhatian. Jika memang sikap sinis dari anggota laki-laki terhadap usulan perempuan disebabkan oleh ketidakmampuan anggota perempuan dalam menyampaikan usulan secara jelas dan meyakinkan, maka upaya peningkatan kemampuan berargumentasi bagi anggota perempuan menjadi kebutuhan yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Namun, upaya ini juga berkait dengan persoalan bagaimana meningkatkan rasa percaya diri di kalangan anggota perempuan, sehingga mereka tidak segan-segan berbicara secara meyakinkan di berbagai rapat dewan.

Kurangnya Pemahaman Isu Perempuan

Salah satu misi utama gerakan perempuan memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen adalah agar kepentingan perempuan bisa diakomodir lewat peran-peran

yang dimainkan oleh anggota legislatif perempuan. Asumsinya adalah karena mereka perempuan, maka mereka akan lebih memahami kebutuhan perempuan. Namun benarkah anggota legislatif perempuan berjuang demi kepentingan perempuan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota legislatif perempuan di DIY belum sepenuhnya paham bahwa salah satu tugas mereka adalah memperjuangkan kepentingan perempuan. Kurangnya pemahaman tersebut menjadi salah satu sebab tidak terakomodirnya kepentingan perempuan di DPRD. Simak pemahaman salah seorang anggota perempuan di DPRD Provinsi DIY: “Di dewan itu tidak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Tidak seperti itu karena kita dibagi empat komisi” (Wawancara dengan Tutiek Masria, 16 Agustus 2007).

Sementara itu, anggota yang lain berpendapat bahwa mereka belum pernah menyampaikan isu atau usulan yang menyangkut kepentingan perempuan dengan alasan bahwa komisi tempat mereka bernaung tidak berkaitan dengan isu perempuan. Aisyah Rais, anggota DPRD Sleman, menyatakan bahwa ia belum pernah menyampaikan usulan yang menyangkut kepentingan perempuan karena komisinya, yaitu Komisi Pembangunan, tidak spesifik membicarakan isu-isu perempuan (Wawancara dengan Aisyah Rais, 6 Juni 2008).

Anis Sri Lestari dari DPRD Kota Yogyakarta juga menyatakan bahwa ia tidak banyak menyampaikan usulan yang menyangkut kepentingan perempuan karena ia berada di Komisi III (Pembangunan). Menurut Anis, bidang Komisi III tidak banyak bersentuhan dengan kepentingan perempuan. Walaupun Anis pernah mengutarakan pentingnya pembangunan yang peduli pada perempuan, hal itu dikemukakan dalam konteks pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga mendapat perhatian dari anggota dewan yang lain dan pemerintah kota (Wawancara dengan Anis Sri Lestari, 30 Mei 2008).

Pernyataan-pernyataan semacam itu menunjukkan bahwa pemahaman anggota legislatif perempuan mengenai isu perempuan belum memadai. Mereka masih berpikir sektoral, yaitu bahwa isu perempuan adalah tugas dan tanggung jawab Komisi I. Nampaknya, pemikiran bahwa isu perempuan bisa diperjuangkan di Komisi manapun belum mereka sadari, padahal isu perempuan berkait dengan semua sektor masyarakat, baik yang dibahas dalam Komisi I, Komisi II maupun Komisi III.

Alasan lain mengapa anggota perempuan tidak banyak memperjuangkan kepentingan perempuan adalah mereka tidak paham apa yang dibutuhkan

oleh kaum perempuan konstituen mereka. Menurut Sumi, memperjuangkan isu perempuan merupakan hal yang sangat berat. Tidak semua orang memahami isu perempuan, bahkan di kalangan kelompok perempuan itu sendiri. Oleh karenanya, Sumi merasa kesulitan ketika hendak memperjuangkan kepentingan perempuan dan ia akhirnya memilih untuk memperjuangkan isu yang benar-benar secara kasat mata disadari dan dibutuhkan oleh masyarakat:

Kembali isu perempuan, kalau itu tidak benar-benar bisa dilihat orang, bisa dipahami, *nggak* mudah. Karena tidak populer barang kali, terutama masyarakat konstituen kita. Yang populer itu mbak, jalan sana. Mbak, kelompok ini butuh ini. Saya *nyari* kelompok perempuan untuk dibantu anggaran tidak mudah. Komunikasi bolak-balik pun, tidak banyak perempuan yang paham. Kadang-kadang waktu saya tidak ada untuk mendampingi, misalnya ibu-ibu yang sudah tua. Membuat kita putus asa (Wawancara dengan Sumi Hadiyanah, 1 Agustus 2008).

Sumi kembali menuturkan pengalamannya bahwa di lapangan atau di masyarakat, tidak banyak perempuan yang berani berbicara dalam forum. Hal ini turut menjadi sumber kendala untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh kelompok perempuan. Kesulitan lain yang dihadapi Sumi dan anggota legislatif lainnya dari PKB, yaitu Evri Sulistyowati adalah mereka kalah populer di hadapan konstituen dibandingkan anggota laki-laki. Situasi itu mempersulit posisi mereka ketika berhadapan dengan konstituen (Sumi Hadiyanah, 1 Agustus 2008).

Dewi mendapati pengalaman serupa. Ia mengakui merasa kesulitan untuk bertemu dengan konstituen perempuan selama terjun ke daerah pada masa reses. Kesulitan itu menyebabkan ia sulit mengetahui dan mengakomodasi apa yang dibutuhkan oleh konstituen perempuan di daerah pilihannya. Setiap kali bertemu dengan konstituen, yang hadir didominasi oleh kaum laki-laki. Akibatnya, aspirasi yang disampaikan kurang mewakili kepentingan perempuan. Walaupun Dewi masuk pertemuan kelompok khusus perempuan, misalnya PKK, hal itu pun tidak membuat Dewi menjadi mudah mengetahui apa yang diinginkan perempuan. Pada pertemuan PKK dominasi ketua PKK sangat terlihat, sehingga aspirasi kaum perempuan yang lain tidak muncul. Akhirnya, Dewi yang kemudian menawarkan ide, yaitu pemberdayaan ekonomi untuk kaum perempuan (Wawancara dengan Dewi Nuraini, 23 Juli 2008).

Sementara itu untuk daerah Sleman, menurut penuturan Fikki Umamah, perempuan mulai berani mengajukan permintaan untuk diperjuangkan anggota legislatif. Sebagian besar perempuan Sleman meminta bantuan modal untuk penguatan ekonomi: "Permintaan biasanya dana untuk pengembangan atau peningkatan ekonomi. Kebetulan di Pemda ada dana untuk pengembangan ekonomi" (Wawancara dengan Fikki Umamah, 6 Juni 2008).

Menilik keinginan konstituen perempuan dan pemahaman anggota legislatif perempuan tentang isu dan kepentingan perempuan terlihat sebagian besar memahami kepentingan yang dibutuhkan perempuan berkisar pada kebutuhan hidup mendasar, yaitu penguatan modal untuk kemandirian ekonomi dan pendidikan. Sementara itu, kebutuhan yang sifatnya lebih strategis, misalnya bagaimana agar perempuan lebih mendapat akses ke ruang publik, agar perempuan terbebas dari tindak kekerasan dan sebagainya belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Arti penting peraturan daerah yang mengakomodir kepentingan perempuan juga belum menjadi perhatian khusus bagi sebagian besar anggota legislatif perempuan. Dewi berpendapat bahwa penyusunan perda tentang kepentingan perempuan belum menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan. Dewi lebih lanjut menjelaskan alasannya mengapa ia menganggap penyusunan perda untuk mengakomodir kepentingan perempuan belum menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan:

Kalau menurut saya perda itu bentuk ideal. Dengan perda bisa menjamin. Cuma permasalahannya tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri. Masalah apa sih di masyarakat yang menyangkut isu perempuan yang perlu diperdakan? Bukan karena saya sendiri kemudian tidak mendukung atau tidak begitu peduli dengan perempuan, tapi saya melihat apa sih sebenarnya isu perempuan yang dibutuhkan yang sampai perlu diperdakan... ketika kemudian ingin sampai ke perda kebutuhan apa sih yang bagi perempuan itu diperlukan. Itu terus terang saya masih ragu (Wawancara dengan Dewi Nuraini, 23 Juli 2008).

Minimnya pemahaman anggota perempuan mengenai isu dan kepentingan perempuan sangat terlihat ketika sidang-sidang DPRD berlangsung. Thomas Kartaya kembali menuturkan bahwa anggota legislatif perempuan di DPRD Kulonprogo hampir tidak pernah mengajukan usulan tentang kepentingan perempuan. Mereka lebih banyak

mengikuti alur diskusi yang sedang berjalan. Bahkan menurut Thomas, walaupun ada usulan yang berkait dengan soal perempuan hal itu justru disampaikan oleh anggota laki-laki yang peduli dengan upaya kesetaraan gender:

Ya kalau akhirnya soal perempuan itu sampai menjadi topik pembicaraan itu bukan dari anggota perempuan, tapi dari rekan-rekan pria yang punya kepedulian terhadap gender. Anggota perempuan kemudian mendukung, tapi belum pernah mengajukan (usulan kepentingan perempuan). Pada umumnya (anggota perempuan) larut dalam persoalan yang dibahas. Di Panmus, Pangar ada (anggota perempuan) yang vokal menyampaikan gagasan tapi tidak langsung pada persoalan perempuan. Setahu saya anggota perempuan belum pernah menyampaikan gagasan soal perempuan (Wawancara dengan Thomas Kartaya, 20 September 2008).

Kondisi yang sama dikemukakan oleh Totok Hedi yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Sleman. Totok menyatakan bahwa anggota legislatif di komisinya sangat jarang menyampaikan usulan atau pendapat dalam sidang-sidang komisi. Menurut Totok, kebanyakan anggota legislatif perempuan bersikap pasif, meskipun ada juga seorang anggota perempuan yang selalu aktif menyampaikan pendapat. Totok mensinyalir pasifnya anggota legislatif perempuan diakibatkan kurangnya pemahaman mereka tentang agenda apa yang harusnya menjadi skala prioritas yang harus mereka perjuangkan di Dewan. Hampir semua anggota berbicara mengenai kemiskinan. Selain itu dari partai politik juga tidak ada pembagian kerja (Wawancara dengan Totok Hedi, 20 September 2008).

Pendidikan Politik oleh Partai Politik

Pendidikan politik merupakan agenda yang dilakukan partai politik untuk memberi pembekalan bagi kader-kader mereka sebelum dan setelah mereka berhasil menjadi anggota legislatif agar mereka memahami fungsi dan tugas yang harus mereka jalankan sebagai wakil rakyat. Sayang sekali pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tidak memilah kebutuhan antara caleg perempuan dan laki-laki, padahal kebutuhan dan tantangan yang dihadapi caleg laki-laki dan perempuan amatlah berbeda. Anis Sri Lestari menuturkan bagaimana ia dulu mengikuti pendidikan politik yang diadakan oleh Partai Keadilan. Anis menceritakan bahwa dalam pendidikan politik tersebut (Anis menyebutnya

pembekalan) tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan:

Caleg-caleg perempuan diberi pembekalan... bukan bagaimana perempuan harus berpolitik, tapi bahwa manusia itu mestinya berjuang ke arah kebaikan. Itu tidak menyinggung perempuan atau laki-laki. Itu sudah suatu kesetaraan. Kita tidak pernah merasa ada perbedaan... Saat itu (2004) ada pembekalan bareng-bareng perempuan seluruh Indonesia. Garis besarnya pembekalan itu isinya bagaimana kita menjaring aspirasi, menyuarakan dalam parlemen (Wawancara dengan Anis Sri Lestari, 30 Mei 2008).

Anis juga menuturkan bahwa pemberi materi berasal dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya adalah kalangan pers, yaitu dari *Jawa Pos* dan ada pula anggota legislatif laki-laki yang dihadirkan untuk menuturkan pengalamannya sebagai anggota legislatif. Dari pengalaman Anis dapat diketahui bahwa sejak awal para caleg perempuan tidak mendapatkan pendidikan politik yang memadai. Hal itu dapat dibuktikan dari pelaksanaannya yang tidak memilah antara caleg perempuan dan laki-laki, dan juga minimnya nara sumber dari kaum perempuan itu sendiri. Padahal perempuan memiliki pengalaman dan problem yang berbeda dengan caleg laki-laki, mengingat kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru di dunia politik. Banyak perempuan belum terlalu familiar dengan dunia politik beserta tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Semestinya forum itu lebih banyak menghadirkan politisi dan anggota legislatif perempuan yang akan bisa bercerita banyak mengenai pengalaman menjadi wakil rakyat, lengkap dengan hambatan-hambatan yang bisa setiap saat dialami perempuan sebagai wakil rakyat.

Pengalaman Anis juga dialami oleh Siti Majmu'ah dari Partai Amanat Nasional (PAN). Siti menuturkan bahwa di PAN pendidikan politik dilakukan dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Namun, setelah berhasil menjadi anggota legislatif, ada pendidikan politik yang khusus diberikan untuk perempuan, yaitu yang diadakan oleh International Republican Institute (IRI) dan kemudian diikuti oleh kaum perempuan PAN. Siti mengemukakan: "Di partai waktu itu tidak dibedakan laki atau perempuan. Tapi ada pelatihan bagaimana fungsi dewan" (Wawancara dengan Siti Majmu'ah, 20 Juni 2008).

Sama halnya dengan pengalaman Siti, Sumi yang berasal dari PKB mengemukakan bahwa dalam pendidikan politik oleh PKB tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Keinginan untuk

mengadakan pendidikan politik khusus untuk perempuan memang ada, tetapi terbentur pada realita bahwa sebagian besar perempuan Nahdlatul Ulama (NU) enggan untuk melakukan kegiatan yang berkait dengan politik:

Kalau pendidikan politik ya laki perempuan, tidak dibedakan. Kalau perempuan ya kita ngadakan sendiri. Itu kan ada PPKB (Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa). Ternyata ketika di situ kita cari perempuan untuk jadi pengurusnya sulit sekali. Mungkin karena di PKB ya? Teman-teman itu memandang politik tidak baik (Wawancara dengan Sumi Hadiyanah, 1 Agustus 2008).

Hingga saat ini mayoritas anggota legislatif perempuan masih terus mengikuti pendidikan politik secara rutin. Dewi mengemukakan bahwa ia dan teman-temannya anggota legislatif perempuan dari PKS di seluruh Indonesia selalu mendapat kesempatan mengikuti pendidikan politik yang diadakan setahun sekali di Jakarta. Berbeda dengan pendidikan politik sewaktu awal mula menjadi anggota legislatif yang dijadikan satu dengan anggota laki-laki, pendidikan politik yang diadakan secara rutin setahun sekali memang dikhususkan untuk perempuan. Dewi menambahkan bahwa materi untuk pendidikan politik terutama adalah mengenai komunikasi politik. Tetapi, forum tersebut tidak menutup kemungkinan membahas isu di luar komunikasi politik. Untuk menjaring materi apa yang diperlukan oleh peserta, maka para anggota legislatif perempuan biasanya akan diminta untuk mengisi kuesioner atau ditanya melalui telepon (Wawancara dengan Dewi Nuraini, 23 Juli 2008).

Pengalaman Dewi dan Siti menunjukkan bahwa upaya partai politik untuk meningkatkan kemampuan anggota legislatif perempuan telah dilakukan bekerja sama dengan lembaga lain. Akan tetapi fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan anggota legislatif untuk berbicara mengajukan pendapat dan berargumentasi dalam rapat-rapat dewan belum terlalu menggembirakan. Kondisi ini menyiratkan kebutuhan khusus suatu pendidikan politik yang mampu meningkatkan keberanian dan ketangguhan anggota legislatif perempuan dalam berbicara di forum rapat-rapat dewan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penghambat utama anggota legislatif perempuan dalam menyuarakan aspirasi bersumber

dari dua aspek. Pertama adalah aspek kultural-struktural lingkungan kerja. Sikap sinis berupa cemoohan atau ejekan dari anggota legislatif laki-laki ketika anggota legislatif perempuan menyampaikan usulan berkait dengan isu perempuan menyebabkan anggota perempuan enggan mengajukan usul.

Aspek kedua bersifat personal-psikologis. Anggota perempuan kurang memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan usul dan pendapat. Hal ini berkait dengan perasaan minoritas perempuan di tengah-tengah mayoritas anggota laki-laki dan kurangnya kemampuan lobi politik. Terlebih lagi sebagian besar anggota legislatif perempuan belum memahami sepenuhnya apa makna isu dan kepentingan perempuan. Mereka bahkan tidak sepenuhnya paham bahwa fungsi mereka di lembaga legislatif adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Kurangnya rasa kepercayaan diri untuk berbicara dan ketidakpahaman akan tugas dan fungsi yang harus mereka lakukan tidak terlepas dari kelalaian partai politik. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik belum memilah kebutuhan anggota legislatif laki-laki dan perempuan. Anggota legislatif perempuan membutuhkan kekuatan psikologis yang luar biasa besar dibandingkan laki-laki karena mereka berada di ruang publik yang didominasi laki-laki dengan cara kerja dan aturan yang sarat dengan kepentingan laki-laki.

Daftar Pustaka

- Astuti, D. (2008) Wawancara dengan penulis pada 3 Juni 2008.
- Aswandiah (2008) Wawancara dengan penulis pada 30 Mei 2008.
- Belum Ada Perda Khusus yang Akomodasi Perempuan. (2007) [Diakses 1 Juni 2007]. <http://www.indomedia.com/bernas/052002/21/UTAMA/21met2.hm>.
- Dewi, M.A. & S.B. Ilkodar. (2007) *Implikasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan bagi Pemenuhan Kepentingan Perempuan (Studi pada DPRD Tingkat I DIY)*. Penelitian Kajian Wanita DP2M Dikti.
- Fatimah, I. (2007) Wawancara dengan penulis pada 16 Agustus 2007.
- Hadibudi, R.G. (2008) Wawancara dengan penulis pada 20 September 2008.
- Hadiyanah, S. (2008) Wawancara dengan penulis pada 1 Agustus 2008.
- Hedi, G.T. (2008) Wawancara dengan penulis pada 20 September 2008.
- Kartaya, T. (2008) Wawancara dengan penulis pada September 2008.
- Lestari, A.S. (2008) Wawancara dengan penulis pada 30 Mei 2008.
- Majmu'ah, S. (2008) Wawancara dengan penulis pada 20 Juni 2008.
- Nuraini, D. (2008) Wawancara dengan penulis pada 23 Juli 2008.
- Rais, A. (2008) Wawancara dengan penulis pada 6 Juni 2008.
- Suara NTB. (2007) *Caleg Perempuan tak Berperan Tentukan Nasib Kaumnya* [diakses 15 Maret 2007] <http://www.suarantb.com/2006/03/16/Sosial/xdetil2.htm>.
- Umamah, F. (2008) Wawancara dengan penulis pada 6 Juni 2008.
- Wahyuni, T. (2008) Wawancara dengan penulis pada 30 Mei 2008.
- Widyo, T.M. (2007) Wawancara dengan penulis pada 16 Agustus 2007.
- Wijayati, E. (2007) Wawancara dengan penulis pada 18 Agustus 2007.